

BAB IV

PENUTUP

I. KESIMPULAN

A. Bentuk - bentuk Pelanggaran / Perbuatan Pidana Terhadap Perusahaan Jasa Pengiriman TKI adalah terdapatnya beberapa bentuk pelanggaran atau perbuatan pidana yang dapat merugikan pekerja migran dan perusahaan. Berikut adalah bentuk-bentuk pelanggaran terhadap perusahaan jasa pengiriman TKI:

1. Pelaku Pelanggaran/Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen
2. Pelaku Pelanggaran/Tindak Pidana Perdagangan Manusia
3. Pelaku Pelanggaran/ Tindak Pidana yang Mengeksploitasi TKI
4. Pelaku yang Melanggar UU Penempatan dan Perlindungan TKI

B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Pelanggaran Pengiriman TKI dalam konteks pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang terlibat dalam pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yaitu perusahaan yang telah melakukan pelanggaran pidana akan di proses hukum berdasarkan bentuk pidana yang dilakukan serta akan diberikan sanksi yang telah di tetapkan sesuai Undang - undang yang berlaku.

II. SARAN

Berikut adalah beberapa saran terkait penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran pengiriman jasa Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang dapat diberikan kepada pemerintah, PJTKI, dan TKI:

A. Kepada Pemerintah

1. Pemerintah perlu memperkuat pengawasan terhadap perusahaan jasa pengiriman TKI. Serta harus melakukan Audit rutin dan inspeksi lapangan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan perlindungan pekerja migran.
2. Pemerintah harus Aktif dalam memberikan sosialisasi regulasi terkait pengiriman TKI kepada masyarakat, termasuk korporasi dan calon TKI. Pengetahuan yang baik tentang hak dan kewajiban akan membantu mengurangi pelanggaran.
3. Pemerintah harus lebih jeli serta lebih selektif dalam memberikan perizinaan operasional bagi PJTKI dan mewajibkan PJTKI melakukan pembaruan Nomor Perizinan sesuai Perda yang ada.

B. Kepada TKI serta Calon TKI

- a. Seorang TKI serta Calon TKI harus memahami hak-hak mereka dan risiko yang terkait dengan pengiriman. Pendidikan dan kesadaran akan membantu mereka mengambil keputusan yang lebih bijaksana.
- b. Sebagai seseorang yang sudah menjadi TKI harus tetap mengikuti perkembangan Hukum serta peraturan terbaru yang ada dan untuk Calon TKI harus lebih cermat dan memahami serta peka terhadap hal - hal yang mengarah tidak sesuai dengan Hukum yang berlaku walaupun hal tersebut sepele.
- c. TKI yang mengalami pelanggaran haknya harus berani melaporkan ke pihak berwenang. Laporan ini akan membantu penegakan hukum dan perlindungan pekerja migran.

Semua pihak harus bekerja sama untuk memastikan penegakan hukum yang efektif dan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja migran Indonesia